

Pola Komunikasi Anggota Legislatif dengan Konstituennya di Surabaya

Communication Patterns between Legislative Members and Their Constituents in Surabaya

Erlin Indrayanti¹, Zulaikha², Nur'annafi Farni Syam Maella³

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

¹erlinindrayanti95@gmail.com, ²zulaikha@unitomo.ac.id, ³nurannafi@unitomo.ac.id

Abstract

This study aims to examine the communication patterns employed by legislative members of the Surabaya City Regional House of Representatives (DPRD) in building relationships with their constituents. Using a descriptive qualitative approach and in-depth interviews with two council members, the research reveals that political communication is carried out through a combination of direct and digital methods. Face-to-face meetings such as community visits and public dialogues remain essential for fostering emotional closeness, while social media is utilized to expand outreach and establish a digital track record. The effectiveness of communication is strongly influenced by the ability to adapt messaging styles to the social and cultural characteristics of the community, with political parties and volunteer teams also playing significant roles in bridging public aspirations. The main challenges include unrealistic public expectations and low levels of political literacy. Therefore, legislators are expected to maintain adaptive, consistent, and educational communication strategies to sustain public trust.

Keywords: Political Communication, Legislator, Constituent, Social Media, Public Participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola komunikasi anggota legislatif DPRD Kota Surabaya dalam membangun hubungan dengan konstituen. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode wawancara mendalam terhadap dua anggota dewan, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi politik dijalankan melalui kombinasi komunikasi langsung dan digital. Pertemuan tatap muka seperti silaturahmi dan reses masih menjadi strategi utama dalam menjalin kedekatan emosional, sementara media sosial digunakan untuk memperluas jangkauan dan membangun rekam jejak digital. Penyesuaian gaya komunikasi dengan karakter masyarakat menjadi faktor penting dalam efektivitas komunikasi, di samping dukungan partai dan tim relawan yang turut menjembatani penyampaian aspirasi. Tantangan yang dihadapi mencakup ekspektasi masyarakat yang belum realistis serta rendahnya literasi politik. Oleh karena itu, anggota legislatif dituntut untuk menjalankan komunikasi yang adaptif, konsisten, dan edukatif. dalam merawat kepercayaan publik.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Legislator, Konstituen, Media Sosial, Partisipasi Publik.

1. Pendahuluan

Komunikasi politik merupakan elemen penting dalam demokrasi, terutama dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga perwakilan seperti DPRD. Di tingkat lokal, anggota legislatif memiliki peran sentral sebagai wakil rakyat yang tidak hanya terlibat dalam proses legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga wajib menjalin komunikasi yang aktif dan dua arah dengan konstituennya. Namun dalam praktiknya, hubungan komunikasi antara anggota legislatif dan masyarakat kerap tidak berjalan efektif. Banyak warga merasa jauh dari wakilnya, tidak mengetahui apa yang sedang diperjuangkan di parlemen, atau tidak yakin apakah aspirasi mereka benar-benar disampaikan. Masalah ini sering kali bersumber dari komunikasi yang cenderung formal, minim pendekatan personal, dan tidak menyesuaikan dengan karakter masyarakat. Ditambah lagi, rendahnya

literasi politik publik menyebabkan ketidaktahuan mengenai fungsi legislatif—masyarakat kerap menganggap bahwa anggota DPRD bertugas melaksanakan program langsung, padahal peran eksekusi berada di ranah eksekutif. Di sisi lain, anggota legislatif juga dihadapkan pada tantangan untuk membagi waktu, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta menghadapi ekspektasi yang tinggi dan tidak jarang tidak realistis. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, hadir pula media sosial dan saluran digital yang menawarkan potensi baru dalam membangun komunikasi politik. Media sosial memungkinkan politisi menyampaikan informasi secara cepat, menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, serta membangun rekam jejak digital atas kerja-kerja politik mereka. Akan tetapi, pendekatan digital ini juga tidak bisa menggantikan sepenuhnya pentingnya komunikasi langsung yang berbasis kedekatan emosional dan interaksi tatap muka, terutama dalam konteks budaya masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan hubungan sosial yang bersifat personal. Dalam konteks Surabaya—sebagai kota metropolitan dengan keberagaman sosial, dinamika politik yang aktif, serta tantangan urban yang kompleks—komunikasi antara legislator dan masyarakat menjadi semakin penting untuk dikaji. Sayangnya, kajian ilmiah yang membahas secara spesifik tentang pola komunikasi anggota legislatif Surabaya dengan konstituennya masih sangat terbatas, terutama yang menyentuh aspek praktik sehari-hari dalam menjangkau aspirasi, strategi menghadapi tantangan komunikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Padahal, pemahaman terhadap pola komunikasi yang dijalankan oleh wakil rakyat sangat penting tidak hanya untuk mengukur efektivitas fungsi representasi, tetapi juga untuk merumuskan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan tujuan menggambarkan secara mendalam bagaimana pola komunikasi anggota DPRD Kota Surabaya dibangun, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi yang diterapkan dalam menjalin relasi politik yang sehat dan akuntabel dengan masyarakat yang mereka wakili.

Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan pola komunikasi yang digunakan oleh anggota legislatif DPRD Kota Surabaya dalam menjalin hubungan dengan konstituen, baik melalui pertemuan langsung maupun pemanfaatan media digital dan media massa, Menganalisis efektivitas pola komunikasi tersebut dalam menyampaikan aspirasi masyarakat serta membangun kepercayaan dan partisipasi politik konstituen terhadap kinerja legislatif.

Konsep Dasar Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses pertukaran informasi antara berbagai aktor dalam sistem politik, termasuk pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat. Menurut McNair (2011), komunikasi politik adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik, baik oleh aktor resmi (seperti pemerintah dan parlemen) maupun nonresmi (seperti aktivis atau warga negara). Dalam konteks ini, anggota legislatif menjadi salah satu aktor utama yang berperan menyampaikan kebijakan publik dan menerima aspirasi masyarakat.

Komunikasi politik bersifat dinamis dan bersandar pada konteks sosial serta perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh cara penyampaiannya, saluran yang digunakan, serta hubungan emosional yang dibangun antara pengirim dan penerima

pesan. Dalam demokrasi representatif, komunikasi politik menjadi jembatan utama antara wakil rakyat dengan pemilihnya.

Fungsi Representatif Legislatif dalam Demokrasi Lokal

Dalam sistem demokrasi, khususnya di tingkat lokal, lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan penganggaran (budgeting). Namun, yang tidak kalah penting adalah fungsi representatif, yaitu sebagai wakil dari suara rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat di lembaga pemerintahan. Fungsi representatif ini menuntut anggota legislatif untuk tidak hanya aktif dalam forum formal seperti rapat komisi dan sidang paripurna, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat secara langsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Pitkin (1967), representasi bukan hanya soal keberadaan fisik di lembaga legislatif, tetapi juga soal bertindak dan berbicara atas nama rakyat. Oleh karena itu, komunikasi yang intens dan terbuka dengan konstituen menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi representatif secara efektif.

Peran Media Sosial dalam Relasi Politik

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan saluran komunikasi baru yang bersifat cepat, luas, dan interaktif, salah satunya melalui media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube kini menjadi alat penting bagi politisi untuk membangun citra, menyampaikan pesan politik, serta menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat secara langsung. Menurut Castells (2009), media sosial memberikan kekuatan baru dalam struktur komunikasi politik karena memungkinkan komunikasi dua arah dan membangun kedekatan emosional yang lebih kuat antara pemimpin dan rakyat. Bagi anggota legislatif, media sosial menjadi instrumen penting untuk menciptakan jejak digital atas kinerja, aktivitas, dan komitmen mereka kepada masyarakat. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana edukasi politik, membentuk opini publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Studi Empiris Terdahulu Terkait Komunikasi Legislatif

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara anggota legislatif dan konstituen berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan publik dan partisipasi politik. Penelitian oleh Yusoff dan Ahmad (2013) di Malaysia, misalnya, menunjukkan bahwa anggota legislatif yang rutin melakukan dialog publik, mendengar keluhan masyarakat, serta aktif di media sosial cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dalam pemilu berikutnya.

Di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Widiyanto (2019) menyimpulkan bahwa pola komunikasi yang bersifat personal dan partisipatif lebih efektif dalam menjangkau aspirasi dibandingkan pendekatan yang bersifat formal dan birokratis. Komunikasi informal, seperti silaturahmi, ngopi bersama warga, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, terbukti mampu membangun kepercayaan dan kedekatan yang berdampak langsung pada persepsi positif terhadap anggota legislatif. Dengan merujuk pada temuan-temuan ini, penelitian tentang pola komunikasi legislatif di Surabaya menjadi penting untuk memahami bagaimana interaksi politik lokal berlangsung dalam praktik, dan bagaimana strategi komunikasi dapat mempengaruhi hubungan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan pola komunikasi antara anggota legislatif DPRD Kota Surabaya dengan konstituennya. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua anggota DPRD Surabaya, yaitu Bapak Arif Fathoni, S.H., dan Bapak Muhaimin, S.H., M.M., yang memiliki pendekatan komunikasi berbeda dalam menjalankan peran representatifnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik interpretatif, yaitu dengan mengkaji narasi hasil wawancara untuk menemukan tema-tema utama seputar bentuk komunikasi, saluran yang digunakan, tantangan komunikasi, dan strategi penguatan hubungan legislatif-konstituen. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi melalui pengamatan terhadap aktivitas para narasumber, baik dari dokumentasi kegiatan formal maupun pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi politik.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pola komunikasi politik yang dijalankan oleh anggota legislatif tidak berdiri sebagai bentuk komunikasi satu arah, tetapi merupakan proses dinamis yang berakar pada hubungan timbal balik antara wakil rakyat dan konstituen. Dalam konteks DPRD Kota Surabaya, pola komunikasi yang berkembang menunjukkan variasi pendekatan yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep yang diuraikan oleh Nurannafi (2018), bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik yang mengarah pada terciptanya proses pengambilan keputusan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Variasi pola komunikasi yang dijalankan anggota DPRD Kota Surabaya meliputi tiga bentuk utama, yaitu komunikasi langsung, komunikasi melalui media, serta komunikasi informal melalui jaringan sosial. Komunikasi langsung seperti silaturahmi, reses, dialog warga, hingga forum-forum informal seperti “ngopi bareng” menjadi metode efektif dalam membangun kedekatan dan mendapatkan aspirasi yang otentik dari masyarakat. Bentuk komunikasi ini bukan hanya menjadi wadah untuk menyampaikan keluhan atau usulan warga, tetapi juga membangun kepercayaan serta ikatan emosional antara konstituen dan legislator. Strategi komunikasi ini juga ditemukan dalam praktik legislator perempuan di DPRD Majalengka, yang sebagaimana dikaji Nurannafi (2018), menjadikan reses sebagai bagian integral dari strategi pengumpulan aspirasi sebelum pengambilan kebijakan anggaran.

Selain komunikasi langsung, pemanfaatan media sosial dan media massa menjadi unsur penting dalam memperluas jangkauan komunikasi politik. Anggota legislatif menggunakan Facebook, Instagram, dan kanal berita lokal sebagai ruang penyampaian informasi kinerja, aktivitas harian, hingga pernyataan politik. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga membentuk rekam jejak digital dan citra politik yang dapat diakses publik secara terbuka. Dalam praktiknya, pendekatan ini menyesuaikan dengan kondisi demografis dan psikografis masyarakat—generasi muda cenderung mengikuti kinerja wakil rakyat melalui kanal digital, sementara generasi tua tetap memprioritaskan komunikasi konvensional. Pemanfaatan media, sebagaimana juga diungkap dalam penelitian Nurannafi, menjadi penopang citra dan instrumen komunikasi politik yang mampu memperkuat eksistensi politisi, terutama di tengah tekanan untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Di luar dua bentuk utama tersebut, komunikasi informal melalui keluarga, relawan, dan jejaring sosial berbasis komunitas juga memainkan peran penting. Banyak anggota dewan yang mengandalkan kerabat atau simpul relawan sebagai perpanjangan telinga mereka di masyarakat. Pola ini dinilai efektif dalam menjangkau informasi dari tingkat bawah, terutama di lingkungan yang tidak terjangkau oleh kanal

resmi atau media digital. Sejalan dengan itu, Nurannafi (2018) juga mencatat pentingnya peran internal partai, fraksi, dan jaringan sosial sebagai pendukung komunikasi politik legislatif, termasuk dalam mendesain isi pesan dan mengidentifikasi khalayak sasaran yang tepat.

Pendekatan komunikasi yang dijalankan anggota DPRD Surabaya juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, legislator menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter audiens: di wilayah dengan mayoritas masyarakat berpendidikan menengah ke bawah, pendekatan informal, bahasa yang membumi, serta gestur persuasif menjadi lebih efektif. Silaturahmi tidak hanya dipahami sebagai bentuk sopan santun, tetapi juga sebagai strategi sosial dan politik untuk menjaga legitimasi wakil rakyat. Di beberapa kasus, silaturahmi menjadi pengganti forum formal yang kaku dan kurang diminati masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam temuan Nurannafi, yang menekankan bahwa pendekatan personal dan segmentasi khalayak merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang harus dirancang secara sadar oleh anggota legislatif.

Tingkat pendidikan, latar ekonomi, dan kultur lokal juga sangat menentukan bentuk komunikasi yang diterima masyarakat. Legislator yang cakap biasanya mampu membaca kebutuhan dan respons masyarakat dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, kemampuan untuk mengadaptasi pesan dan media sangat berpengaruh. Legislator perempuan dalam penelitian Nurannafi, misalnya, mengemas pesan politik dengan mempertimbangkan isu-isu yang relevan seperti kesejahteraan perempuan dan anak, serta mampu merancang strategi komunikasi berdasarkan aspirasi spesifik kelompok marjinal. Di Surabaya, hal serupa terjadi ketika anggota legislatif menyesuaikan narasi komunikasinya dengan isu-isu lokal seperti pelayanan publik, kebersihan lingkungan, hingga pendidikan dan infrastruktur wilayah.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi politik di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh media yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan legislator untuk menjadi komunikator politik yang adaptif, memahami struktur sosial masyarakat, dan responsif terhadap aspirasi. Kesadaran akan pentingnya komunikasi dua arah, kejelasan isi pesan, serta kesiapan mendengarkan, menjadi elemen kunci dalam membentuk relasi yang sehat antara anggota legislatif dan konstituennya. Strategi ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual dalam politik lokal, di mana keberhasilan seorang wakil rakyat tidak hanya diukur dari hasil kerjanya, tetapi juga dari bagaimana ia membangun dialog yang terbuka dan konsisten dengan masyarakatnya.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi antara anggota legislatif DPRD Surabaya dan konstituennya sangat bergantung pada kombinasi komunikasi langsung dan digital. Pertemuan tatap muka seperti silaturahmi dan reses tetap relevan karena membangun kedekatan emosional, sementara media sosial memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan transparansi kinerja. Pendekatan personal menjadi kekuatan utama dalam menjalin kepercayaan publik. Gaya komunikasi yang disesuaikan dengan karakter masyarakat, dilandasi empati dan kesetaraan, terbukti mampu menciptakan hubungan yang positif dan partisipatif.

Namun, masih terdapat tantangan dalam hal ekspektasi masyarakat yang belum sejalan dengan peran legislatif. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi politik agar masyarakat memahami batasan dan fungsi wakil rakyat secara realistis.

Partai politik juga berperan penting sebagai penghubung antara legislatif dan rakyat, terutama melalui kegiatan pendidikan politik, pembinaan kader, dan forum-forum diskusi yang melibatkan masyarakat luas. Sebagai rekomendasi, anggota legislatif perlu mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif dan konsisten, memadukan pendekatan emosional dan teknologi informasi, serta aktif mendengarkan dan

merespons aspirasi rakyat secara berkelanjutan demi membangun demokrasi lokal yang sehat dan berdaya

5. Daftar Pustaka

- Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.
- McNair, B. (2011). *An Introduction to Political Communication* (5th ed.). Routledge.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Nugroho, R. (2015). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Strategi Praktis*. Prenadamedia Group.
- Nurannafi, F. S. M. (2018). Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Perempuan Dalam Memperjuangkan Anggaran Responsif Gender (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Anggota DPRD Kabupaten Majalengka). *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v3i1.144>
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Widianto, A. (2019). Pola komunikasi anggota legislatif dengan konstituen dalam membangun kepercayaan politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 45–57. <https://doi.org/10.22146/jsp.34687>
- Yusoff, M. A., & Ahmad, A. (2013). Political communication and public opinion in Malaysia: A case study of the 13th general election. *Asian Social Science*, 9(8), 47–55. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n8p47>